

**SINERGITAS POLRES DENGAN DINAS KOMINFO  
DALAM PENINGKATAN KEPEDULIAN KAMTIBMAS**

***SYNERGY OF POLRES WITH KOMINFO DEPARTMENT  
IN IMPROVING KAMTIBMAS CARE***

**Bonaparte Priyatna**

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Keamanan dan ketertiban yang kondusif merupakan dambaan seluruh masyarakat, karena terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akan membuat rasa tidak aman dan nyaman serta merugikan masyarakat. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 13 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Polri harus mampu bekerjasama dengan semua golongan yang ada sesuai dengan program Grand Strategi Polri Tahap II : *PARTNERSHIP BUILDING* (2011 - 2015), di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri, sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya. Polri juga harus mampu mempertahankan keamanan dan keteraturan sosial akibat dari globalisasi budaya berkait dengan kemajuan teknologi yang mampu merubah perilaku masyarakat pada aspek sosial budaya.

**Kata kunci:** *Sinergitas, Kominfo, Kamtibmas*

**ABSTRACT**

*Conducive security and order are the desires of the entire community, because disturbances in security and order will make the sense of insecurity and comfort and detrimental to society. The maintenance of public security and order is the main task of the National Police as stated in Law No. 2 of 2002 article 13 which states that the National Police is the guardian of security and public order, law enforcement and protector of protectors and public servants. The Indonesian National Police must be able to cooperate with all existing groups according to the Grand Strategy of the National Police Phase II: *PARTNERSHIP BUILDING* (2011 - 2015), where close cooperation with various parties related to the work of the National Police needs to be built so as to carry out their roles and functions. The National Police must also be able to maintain social security and order as a result of cultural globalization related to technological advances that are able to change people's behavior in the socio-cultural aspects.*

**Keywords:** *Synergy, Communication and Information, Kamtibmas*

## Pendahuluan

Media Sosial dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan kamtibmas mengharuskan Polri untuk melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam menangkal perubahan sosial budaya masyarakat yang bersifat negatif. Artinya, diperlukan aktifitas yang proaktif dalam menjalin interaksi sosial dengan kelompok atau komunitas tertentu berkait dengan harkamtibmas. Jalanan interaksi sosial yang dimaksudkan adalah membangun komunitas peduli kamtibmas. Media sosial memiliki dampak yang menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Namun sayangnya globalisasi telah menyeret sebagian besar masyarakat Indonesia kepada peradaban dan kebudayaan.

Melihat permasalahan tersebut maka Babinkamtibmas pada polsek-polsek di Polres Jajaran yang merupakan ujung tombak dalam menjalankan tugas kepolisian harus bisa menjalin kerjasama dengan Kominfo yang bertujuan membangun komunitas peduli kamtibmas. Namun ternyata peran Babinkamtibmas ini masih terasa kurang dalam menjalin kerjasama dengan Kominfo sehingga masih adanya tumpang

tindih terhadap informasi permasalahan yang ada dimasyarat dan akhirnya tidak adanya penyelesaian masalah yang pasti.

Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi- regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418-419)<sup>9</sup>.

West (2002) menetapkan indikator-indikator kerja sama sebagai alat ukurnya sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik.

<sup>9</sup> [webcache.googleusercontent.com, Kerjasama, diunduh melalui http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oesYw9y1yL8J:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D26193+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oesYw9y1yL8J:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D26193+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id), di akses tanggal 17 Juli 2012

<sup>10</sup> [repository.usu.ac.id, Indikator Kerjasama, diunduh melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37983/4/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37983/4/Chapter%20II.pdf), di akses tanggal 17 juli 2012

b. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.

c. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas.

Teori ini digunakan untuk mengupas atau membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang akan dilakukan.

### C. Teori Manajemen (George R Terry)

Teori manajemen menurut George Terry<sup>11</sup> dalam tulisan ini digunakan sebagai pisau analisa pada bab 3 dan bab 5, untuk membahas metode membangun komunitas peduli kamtibmas dalam rangka terwujudnya harkamtibmas, yang meliputi:

1. *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. *Organizing*, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. *Motivating*, mengarahkan dan menyalurkan perilaku manusia

kearah tujuan-tujuan.

5. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

### E. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Freddy Rangkuti, 2004:19) adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang selanjutnya diidentifikasi guna menemukan cara, solusi atau alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi yang diharapkan.

1. Kekuatan (strength) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas atau sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif menangani peluang dan ancaman.
2. Kelemahan (weakness) adalah situasi internal dimana kompetensi, kapabilitas atau sumberdaya organisasi yang pemanfaatannya dirasakan belum optimal dalam menangani peluang dan ancaman.
3. Peluang (opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan.
4. Ancaman (threats) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi

---

<sup>11</sup> Terry R George, 1992, *Dasar Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal 9, 10

menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas.

### Pembahasan

Dalam kondisi faktual dapat diidentifikasi persoalan yaitu Bagaimana Polri dalam melakukan kerjasama dengan Kominfo dan upaya yang dilakukan untuk membangun komunitas peduli kamtibmas dalam rangka terwujudnya harkamtibmas. Cara yg di lakukan berpedoman terhadap pengertian yang dingkapkan oleh

Williams dan Sawyer (2005), bahwa Teknologi Informasi sebagai sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi<sup>12</sup>. Teknologi informasi ini sangat membantu aktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh komunitas peduli kamtibmas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel.2  
Data Pendukung Komunitas Peduli Kamtibmas

No.	WILAYAH	PEMEGANG ALKOM	RADIO PANCAR ULANG	PENGGUNA BBM	Keterangan
1.	Polsek A	46 Org	1 unit	67 Org	4 grup BBM
2.	Polsek B	37 Org	-	21 Org	1 grup BBM
3.	Polsek C	34 Org	1 unit	23 Org	3 grup BBM
5.	Polsek D	42 Org	1 unit	26 Org	1 grup BBM
6.	Polsek E	16 Org	-	5 Org	Tdk ada grup BBM

Sumber: Satbinmas Polres dan Diskominfo tahun 2013

Tabel 2 adalah merupakan keadaan masyarakat yang peduli terhadap kamtibmas dengan melakukan swadaya untuk pengadaan Alkom maupun HP *Blackberry/ Android* untuk BBM. Kepedulian ini didasari atas kepekaan terhadap kamtibmas di wilayah mengingat masyarakat mengharapkan kondisi yang nyaman di wilayah.

### A. KEMAJUAN INFORMASI TERHADAP KOMUNITAS

### PEDULI KAMTIBMAS

Kemajuan informasi yang semakin pesat disikapi masyarakat dengan memanfaatkan peralatan komunikasi untuk menjalin interaksi sosial antar warga di sebuah wilayah. Dalam perkembangan waktu, terjadi saling tukar menukar informasi tentang kondisi keamanan di wilayah masing-masing dengan harapan dapat dicapai suatu kenyamanan dan ketentraman, interaksi

<sup>12</sup>Admin, *Pengertian Teknologi Informasi*, dalam <http://www.aneahira.com/pengertian->

[teknologi-informasi.htm](http://www.aneahira.com/pengertian-teknologi-informasi.htm), diunduh tanggal 17 Juli 2012

sosial antar warga tersebut berdampak sebagai berikut:

1. Pengadaan Radio Pancar Ulang (RPU) dalam penggunaan frekuensi tanpa memperhitungkan alokasi frekuensi yang telah ditentukan oleh Diskominfo Pemda Bandung. Hal ini sering menimbulkan gangguan pancaran terhadap komunikasi pihak lain. Perwira Urusan Telematika Polres Bandung belum pernah melakukan pendekatan dan sosialisasi serta bimbingan teknis berkait dengan operasionalisasi RPU agar tidak mengganggu frekuensi lain yang resmi.
2. Tidak ada legalitas penggunaan jalur frekuensi dari Diskominfo meskipun Ijin Prinsip untuk harkamtibmas. Polres Bandung tidak pernah menyikapi dengan memfasilitasi perijinan penggunaan frekuensi dengan Diskominfo meskipun substansi dari keseluruhan aktifitas masyarakat tersebut adalah mendukung sepenuhnya tugas Polres Bandung.
3. Kegiatan masyarakat membentuk kelompok informal dalam konteks harkamtibmas belum disikapi dengan baik oleh Polres Bandung cq. Satbinmas sehingga terkesan bergerak sendiri-sendiri dan sering terjadi main hakim sendiri ketika terjadi gangguan kamtibmas dan tertangkap tangan.

### **SINERGITAS POLRI DENGAN KOMINFO DALAM MEMBANGUN KOMUNITAS PEDULI KAMTIBMAS.**

Peran Diskominfo guna membangun komunitas peduli kamtibmas dengan menggunakan peralatan teknologi informasi sangat membantu tugas Polres . Namun kenyataannya, fenomena ini tidak

disikapi secara proaktif oleh Polres sebagai pengemban harkamtibmas di wilayah, terlihat dari program kerja Polres dalam bidang harkamtibmas tidak terdapat kegiatan untuk memberdayakan kepedulian masyarakat pada komunitas ini yang dituangkan dalam manajemen sebagai berikut:

1. *Planning*, Polres belum pernah merencanakan sebuah kerjasama yang sinergis dengan Diskominfo untuk membangun komunitas peduli kamtibmas, dan menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena tuntutan individu atau kelompok dalam satu wilayah kecil. Dampaknya adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh komunitas terkesan liar dan melanggar hukum (penggunaan frekuensi tanpa ijin). Perencanaan anggaran harkamtibmas difokuskan kepada giat turjawali dan Polmas (sambang warga dan sosialisasi Polmas)
2. *Organizing*, Polres belum melaksanakan langkah pengorganisasi terhadap komunitas peduli kamtibmas, mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan dengan mengambil langkah memperdalam kerjasamanya kepada Diskominfo untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkait dengan harkamtibmas. Dampak nyata adalah keberadaan komunitas peduli kamtibmas kurang tidak berjalan karena tidak diakui oleh Polres .
3. *Staffing*, Polres melaksanakan

penyusunan staf berdasarkan Konsep Polmas (Perkap No. 7/2008 tentang Strategi Polmas) secara kaku (kurang fleksibel) dalam menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Hal ini dilakukan tanpa memperhitungkan keberadaan Diskominfo sebagai lembaga yang lebih potensial dalam harkamtibmas dikarenakan memiliki informasi yang lebih akurat.

4. *Motivating*, Polres cq. Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas dalam melaksanakan kemitraan sesuai konsep Polmas hanya kepada program kerja baku yaitu sambang warga yang dikenal atau toga, tomas, toda, pimpinan informal adat. Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas mengetahui keberadaan komunitas peduli kamtibmas di wilayahnya hanya sebatas kenal biasa, tidak terjadi komunikasi yang intens.
5. *Controlling*, dalam mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan, Polres tanpa memperhitungkan keberadaan dan kontribusi baik Diskominfo maupun komunitas peduli kamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polri.

Dampak dari sikap Polres yang tidak memanfaatkan adanya Diskominfo dan

mengabaikan aktifitas masyarakat pengguna informasi dapat mengakibatkan tidak terjalin komunikasi, kurangnya informasi yang bisa digunakan sebagai sarana kemitraan dengan komunitas yang peduli terhadap kamtibmas sehingga perwujudan harkamtibmas di wilayah Polres tidak tercapai dengan maksimal.

### **Kesimpulan**

Dampak kemajuan informasi terhadap kehidupan masyarakat belum mampu disikapi oleh Polres . Hal ini dikarenakan kendala internal pada sumber daya manusia yang belum peka terhadap perubahan lingkungan strategis. Upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama melalui jalinan interaksi sosial yang ditingkatkan menjadi kemitraan sejajar melalui fasilitasi, bimbingan dan sosialisasi tentang manfaat teknologi informasi dikaitkan dengan harkamtibmas

Upaya Polres menjalin kemitraan dengan Diskominfo dalam rangka terwujudnya harkamtibmas dirasakan belum maksimal. Langkah yang ditempuh oleh Polres adalah melakukan koordinasi terkait tukar menukar informasi menyangkut kasus yang terjadi dimasyarakat. Langkah konkrit diantaranya adalah Kelancaran informasi tentang kamtibmas di wilayah melalui komunikasi Radio dan BBM (*Blackberry Messenger*).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Ambar Teguh, Sulistiani. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 705
- Rangkuty Freddy. 2009 *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiriabadi.
- Sri Wahyudi Agustinus. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Pierce, John A dan Richard B Robinson. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- P.J, Hildreth & Kimble, C. 2002. “*The Duality of Knowledge*” *Information Research*, 8 (1), paper no. 142.
- George Terry R. 1992. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal 9, 10

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Juklak dan Juknis yang berkait

Undang Undang No. 2 tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang Undang No. 11 tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (ITE)Perkap No. 7 tahun  
2008